BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi yang telah terjadi pada tahun 1998 yang lalu telah berdampak pada berdagai aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Krisis ini tidak saja berdampak bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga berpengaruh pada kehidupan aktivitas pemerintahan baik pusat maupun daerah. Sekalipun demikian, krisis tersebut membawa hikmah akan kebutuhan reformasi pada pemerintahan di Indonesia. Salah satu unsur dari reformasi tersebut adalah menyangkut diberlakukannya otonomi daerah. Hal tersebut dikarena tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan daerah. Campur tangan pemerintah pusat pada masa pemerintahan yang lalu menyebabkan tidak berkembangnya kreativitas dan terhambatnya pengembangan potensi daerah yang dimilikinya. (Bernanda Gatot Tri Bawono, 2008).

Peraturan yang mengatur tentang otonomi daerah telah diperbaharui dua kali, yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi fiskal. Seiring dengan berkembangnya otonomi daerah Undang-undang tersebut diperbaharui dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setelah otonomi daerah secara resmi diberkalukan di Indonesia, daerah sudah diberi kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah. (Bernanda Gatot Tri Bawono, 2008).

Selain itu, Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. (Bernanda Gatot Tri Bawono, 2008).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda bagi daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapinya dengan sedikit rasa khawatir dan was-was. Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah. (Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah,2010).

Pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonom diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Indonesia. (M.Hendriar K Hs)

Pemberian tanggungjawab diikuti dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Dengan demikian pemerintah diharapkan dapat lebih mengerti dan dapat memenuhi aspirasi masyarakat di daerahnya, selain itu pemerintah juga diharapkan agar dapat lebih menggali sumber-sumber atau potensi daerahnya sehingga bisa membiayai pengeluarannya untuk pelaksanaan belanja daerahnya. (Budi S. Purnomo, 2009).

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh daerah. Adapun struktur belanja berdasarkan kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. (Budi S. Purnomo, 2009).

Belanja Operasional Walikota dan Wakil Walikota Capai Rp 5.000.000.000 lebih. Tahun 2012, proyek belanja tidak langsung Pemko Medan mencapai Rp 1.115.661.822.971. Kondisi ini naik sekitar 5.4 % dari tahun 2010 yakni Rp 979.768.525.400. Hal ini terungkap pada Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Medan tahun 2012, di hotel Emerald Darden Medan. (Dadang Supriadi, 2011).

Proyek belanja dan pengeluaran pembiayaan khusus bagi belanja penerimaan anggota dan pimpinan DPRD serta operasional KDH/WKDH mencapai Rp 5.924.500.000. Biaya ini naik 2.4 % dari Tahun 2010 yang berkisar Rp 5.762.744.000, sedangkan belanja langsung tahun 2012 diproyeksikan Rp 337.281.947.163. Hal ini mengalami kenaikan 20.11 % dibandingkan tahun 2010 yang berkisar Rp 234.043.435.530. (Dadang Supriadi, 2011).

Hal tersebut didukung oleh fenomena yang terjadi di Pemerintah Kota Bandung yaitu berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Belanja Daerah dan Realisasi Belanja Daerah Kota Bandung selama sembilan tahun terakhir, dari tahun aanggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2009 yang dapat di lihat dari pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Anggaran Belanja dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001 sampai Tahun 2009

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
2001	Rp 571,650,654,699.57	Rp 562,268,168,632.57	98.36
2002	Rp 655,847,528,819.14	Rp 646,590,348,280.00	98.59
2003	Rp 1,010,900,333,988.41	Rp 945,824,122,537.58	93.56
2004	Rp 1,046,425,772,243.00	Rp 975,023,708,152.70	93.18
2005	Rp 1,157,011,927,060.00	Rp 1,096,592,281,568.00	94.78
2006	Rp 1,375,191,194,000.00	Rp 1,266,047,202,038.00	92.06
2007	Rp 1,786,806,337,918.53	Rp 1,552,886,614,168.00	86.91
2008	Rp 2,260,409,191,308.53	Rp 2,058,920,582,037.55	91.09
2009	Rp 2,498,896,793,515.08	Rp 2,240,739,995,151.00	89.67

Sumber : Pemerintah Kota Bandung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran belanja dengan realisasi belanja dari tahun 2001-2009 tidak sama jumlahnya, menandakan tidak ekonomisnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana jumlah realisasinya lebih kecil apabila dibandingkan dengan anggarannya. Padahal dalam Standar Akuntansi Pemerintah telaah kritis PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memperediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD). Dapat dilihat bahwa realisasi harus sesuai dengan anggarannya, sedangkan dari tabel diatas antara anggaran dengan realisasi tidak sama.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan Tugas Pembantu. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pemberian Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah adalah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan kebijakan fiskal. Dana Perimbangan selain

dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan Pemerintahaan antara Pusat dengan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Salah satu dari Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Budi S. Purnomo, 2009).

Dalam menggunakan dana perimbangan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dimana dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pemerintah daerah harus menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Akan tetapi pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat sering dijadikan sumber dana utama oleh pemerintah daerah untuk membiayai operasi utama sehari-hari, yang oleh pemerintah daerah dilaporkan diperhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah. (Bernanda Gatot Tri Bawono, 2008).

Dalam komposisi belanja negara, Ani mengatakan transfer ke daerah memang hanya tercatat Rp 344,5 triliun. Namun, jika melihat detil komposisi belanja negara, anggaran belanja daerah sesungguhnya jauh lebih besar, yaitu mencapai Rp 693 triliun atau sekitar 61,54% dari total belanja. (Ramdhani Sudrajat, 2010).

Dana milik pemerintah daerah yang ada di perbankan masih sangat besar. Hingga April lalu, sekitar Rp 90 triliun dana milik pemerintah daerah, kabupaten atau provinsi masih belum tersalurkan. Dana tersebut masih tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, giro dan deposito. Dana ini, menurut Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mayoritas hanya digunakan untuk kebutuhan operasional pemerintah daerah dan tidak hanya disimpan di Bank Pembangun Daerah. Masih tingginya dana di daerah, menurutnya belum tersalurkan disinyalir sebagai salah satu penyebab masih rendahnya pergerakan sektor riil terutama di daerah-daerah (Santoso, 2007).

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Dana Alokasi Umum dan Realisasi Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota Bandung selama sembilan tahun terakhir, dari tahun aanggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2009 yang dapat di lihat dari pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Anggaran Dana Alokasi Umum dan Realisasi Dana Alokasi Umum

Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001 sampai Tahun 2009

Tahun	Anggaran DAU	Realisasi DAU	%
2001	Rp 341,620,000,000.00	Rp 341,618,150,032.00	99.99
2002	Rp 388,260,000,000.00	Rp 388,260,000,000.00	100
2003	Rp 416,680,000,000.00	Rp 416,680,000,000.00	100
2004	Rp 434,500,000,000.00	Rp 439,689,469,000.00	101.19
2005	Rp 458,070,000,000.00	Rp 458,072,000,000.00	100
2006	Rp 632,379,000,000.00	Rp 632,379,000,000.00	100
2007	Rp 827,608,000,000.00	Rp 828,294,700,000.00	100.08
2008	Rp 965,516,430,000.00	Rp 965,518,566,800.00	100
2009	Rp 989,245,660,000.00	Rp 989,233,620,000.00	100

Sumber : Pemerintah Kota Bandung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dana Alokasi Umum dari tahun ke tahun meningkat. Dan Dana Alokasi Umum yang melebihi dari Anggaran yaitu pada tahun 2004, 2005, 2007 dan 2008. Sedangkan Dana Alokasi Umum yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2001 dan 2009 menandakan tidak efektifnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Dana Alokasi Umum yang sama dengan Anggaran yaitu tahun 2002, 2003, dan 2006. Dimana PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD).

Dalam melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan asas desentralisasi salah satu sumber utama untuk daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.

Masalah yang dihadapi sekarang adalah masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga akan menimbulkan pengaruh langsung terhadap kemampuan daerah untuk membiayai anggaran rutin dan anggaran pembangunan di hampir beberapa daerah. (Bambang SP, 2010).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung masih sangat kecil, yakni Rp 163 miliar atau delapan persen dari pengeluaran belanja Rp 2,06 triliun. DPRD menekankan agar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) meningkatkan

PAD sampai Rp 200 miliar. Ketua Komisi B DPRD Kab. Bandung, H. Syaiful Bahri mengatakan, masih banyak kelemahan dalam pengelolaan PAD. (Bambang SP, 2010).

Pemerintah Kab. Bandung akan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata sekitar Rp 3 miliar karena tidak boleh lagi memungut pajak tersebut. Sementara PAD dari Perhutani ataupun objek-objek wisata yang dikelola Perhutani masih kecil. (Hary, 2011).

Empat Badan Usaha Milik Daerah Kota Bandung yang telah mendapatkan penyertaan modal sejak didirikan sampai 2009 masih belum memberikan kontribusi keuntungan pada Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Ke empat BUMD itu adalah PD Kebersihan, PD Pasar Bermartabat, PDAM, dan BPR Kota Bandung. Haru menegaskan, tidak optimalnya pendapatan dari BUMD tersebut karena kinerja perusahaan, gemuknya struktur perusahaan, kredit macet di BPR, tingkat kebocoran air PDAM, dan pengelolaan aset yang pengelolaannya dilakukan pihak ketiga. (Alwan Ridha Ramdani, 2010).

Berikut ini adalah data mengenai perkembangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama sembilan tahun terakhir, dari tahun aanggaran 2001 sampai dengan tahun anggaran 2009 yang dapat di lihat dari pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pemerintah Kota Bandung

Tahun 2001 sampai Tahun 2009

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	%
2001	Rp 126,782,348,151.29	Rp 123,984,485,749.23	97.79
2002	Rp 197,699,717,568.00	Rp 182,064,238,544.02	92.09
2003	Rp 229,749,164,455.00	Rp 213,029,461,862.25	92.72
2004	Rp 215,114,010,650.00	Rp 222,909,941,952.75	103.62
2005	Rp 213,100,251,482.00	Rp 225,596,438,613.00	105.86
2006	Rp 238,305,532,000.00	Rp 253,882,919,542.87	106.57
2007	Rp 281,981,582,738.93	Rp 287,249,534,044.93	101,87
2008	Rp 338,376,369,006.00	Rp 314,627,155,412.30	92.98
2009	Rp 369,137,442,213.08	Rp 360,152,627,960.00	97.57

Sumber : Pemerintah Kota Bandung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun meningkat. Dan Pendapatan Asli Daerah yang melebihi dari Anggaran yaitu pada tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2001, 2002, 2003, 2008 dan 2009 menandakan tidak efektifnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana PP No. 24 Tahun 2005 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi, yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD). Sedangkan dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2001-2009 antara anggaran dan realisasi jumlahnya tidak sama.

Beberapa penelitian sebelumnya berkaitan dengan pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah diantaranya yang dikemukakan oleh Mutiara Maimunah dan Rusdi Akbar (2008). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa

pertama, hasil pengujian dari hipotesis alternatif pertama dan kedua diterima, artinya besarnya nilai DAU dan PAD berpengaruh positif besarnya nilai Belanja Daerah. Kedua, hasil pengujian hipotesis alternatif ketiga untuk mengetahui terjadi tidaknya *fypaper effec*t, juga diterima. Keempat, tidak dapat diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun yang tinggi di Kabupaten/Kota di Sumatera. Selain itu, menyatakan bahwa kelembagaan yang lemah bisa memicu penyimpangan dana perimbangan, utamanya DAU. Selain itu, minimnya pembiayaan sektor kesehatan yang terkesan "barang swasta" padahal merupakan bagian dari " barang publik" akibat DAU yang habis hanya untuk biaya bayar gaji pegawai.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **" Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, perlu adanya pengidentifikasian masalah sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2001, 2002, 2003, 2008 dan 2009.
2. Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Kota Bandung yang kurang dari Anggaran yaitu pada tahun 2001 dan 2009.
3. Realisasi belanja daerah pada Pemerintah Kota Bandung tidak selalu mencapai target atau anggaran yang telah dianggarkan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis informasi beserta data yang relevan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan untuk menjawab masalah-masalah tertentu yang ada kaitannya dengan Belanja Daerah

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetatui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk mengetatui bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk mengetatui bagaimana Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk mengetatui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk mengetatui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang penulis tujukan pada dinas pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Bagi dinas yang diteliti, diharapkan akan memberikan informasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana ALokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah sehingga bisa digunakan dalam mengamati peningkatan serta penurunan Belanja Daerah yang dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana ALokasi Umum.
2. Bagi pegawai pemerintah yang diteliti, diharapkan memberikan informasi tentang sejauh mana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

   Dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman penulis mengenai Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung.

2 Bagi Instansi

   Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi

Umum (DAU) yang Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung.

3. Bagi Peneliti Lain

   Dapat dijadikan sebagai bahan referensi pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang Berpengaruh Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan melaksanakan penelitian pada Pemerintah Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Wastukancana No. 2 Telp. 4230393.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret 2011 sampai dengan Juli 2011.

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Feb 2011	**Mar 2011**	**Apr 2011**	**Mei 2011**	**Jun 2011**	**Jul 2011**	**Agst 2011**
I	**Tahap Persiapan :**							
	1.Membuat outline dan proposal UP	■						
	2.Mangambil formulir penyusunan skripsi	■						
	3.Menentukan tempat penelitian	■	■					
	4. Sidang Komprehensif		■					
II	**Tahap Pelaksanaan :**							
	1. Bimbingan UP		■					
	2. Pendaftaran Seminar UP			■				
	3. Seminar UP			■	■			
	4. Revisi UP			■	■			
	5.Membuat outline dan proposal Skripsi				■			
	6. Penelitian Perusahaan				■	■		
	7. Penyusunan skripsi				■	■	■	■
	8. Bimbingan skripsi				■	■	■	■
III	**Tahap Pelaporan :**							
	1.Menyiapkan draft skripsi						■	■
	2. Sidang akhir skripsi						■	■
	3.Penyempurnaan laporan skripsi						■	■